



**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR **27** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58  
TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,  
HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN  
STANDARISASI HARGA BARANG/ JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran angka romawi I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN huruf B. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Semarang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG		
<b>1</b>	<b>LUAR JAWA</b>	
	Tingkat A :	
	Bupati dan Ketua DPRD	2,000,000
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	1,900,000
	Tingkat B :	
	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	1,800,000
	Pejabat Eselon II	1,250,000
	Tingkat C :	
	Pejabat Eselon III	1,000,000
	Pejabat Eselon IV dan V	810,000
	PNS Golongan IV	750,000
	PNS Golongan III	700,000
	PNS Golongan II dan I	650,000
<b>2</b>	<b>DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur</b>	
	Tingkat A :	
	Bupati dan Ketua DPRD	2,000,000
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	1,900,000
	Tingkat B :	
	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	1,800,000
	Pejabat Eselon II	1,200,000
	Tingkat C :	
	Pejabat Eselon III	1,000,000

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas Daerah dan/atau dalam Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri

2. Perjalanan Dinas terdiri dari :  
 a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Semarang  
 b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Semarang

	Pejabat Eselon IV dan V	790,000	3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan melewati batas Daerah Kabupaten Semarang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula
	PNS Golongan IV	735,000	
	PNS Golongan III	700,000	
	PNS Golongan II dan I	670,000	
3	<b>Rata-Rata Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta :</b>		
	<b>Lebih dari 8 (delapan) Jam atau Sehari :</b>		
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD	750,000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	650,000	
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	285,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	250,000	4. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
	PNS Golongan IV	210,000	
	PNS Golongan III	200,000	
	PNS Golongan II dan I	190,000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>		
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD	250,000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	210,000	
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	205,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	175,000	
	PNS Golongan IV	155,000	
	PNS Golongan III	150,000	
	PNS Golongan II dan I	145,000	5. Biaya Perjalanan dinas terdiri atas Komponen sebagai berikut :
4	<b>Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu penginapan) untuk peserta rapat :</b>		
	<b>Kota Semarang :</b>		a. uang harian;
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	270,000	b. biaya penginapan;
	Tingkat C :		c. biaya transport;
	Pejabat Eselon III	250,000	d. uang representasi
	Pejabat Eselon IV dan V	225,000	e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/ atau
	PNS Golongan IV	205,000	f. biaya menjemput/ mengantar jenazah.
	PNS Golongan III	195,000	6. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
	PNS Golongan II dan I	185,000	
	<b>Kota Salatiga</b>		7. Biaya Penginapan terdiri dari :
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	255,000	
	Tingkat C :		b. Tempat penginapan lainnya ;
	Pejabat Eselon III	230,000	Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
	Pejabat Eselon IV dan V	210,000	Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai
	PNS Golongan IV	190,000	
	PNS Golongan III	180,000	
	PNS Golongan II dan I	170,000	

5	Perjalanan dinas pengemudi atau yang mendampingi peserta rapat (perlu menginap) untuk wilayah :		tabel, dibayarkan secara lumpsom dengandilampiri surat pernyataan tidak menginap di hotel atau Tempat penginapan lainnya
	<b>Kota Semarang :</b>		
	Pejabat Eselon III	165,000	
	PNS Golongan IV	150,000	
	PNS Golongan III	145,000	
	PNS Golongan II dan I	140,000	
	<b>Kota Salatiga</b>		8. Biaya transport terdiri dari :
	Pejabat Eselon III	155,000	a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandarapelabuhan keberangkatan;
	Pejabat Eselon IV dan V	145,000	
	PNS Golongan IV	135,000	
	PNS Golongan III	130,000	
	PNS Golongan II dan I	125,000	
	<b>Perjalanan dinas ke Kota Smg (PP) : Lebih dari 8 (delapan) Jam :</b>		
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	120,000	b. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan secara berombongan dapat menggunakan taxi atau kendaraan lain secara bersama sama dan dipertanggungjawabkan secara Add Cost pada kegiatan berkenaan
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	110,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	100,000	
	PNS Golongan IV	90,000	
	PNS Golongan III	85,000	
	PNS Golongan II dan I	80,000	c. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/Bandara/ pelabuhan keberangkatan danKepulauanBiaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>		9. Perjalanan dinas diperbolehkan menggunakankendaraan dinas/pribadi atau sewa
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	80,000	
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	75,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	70,000	10. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan sewa Biaya sewa sesuai dengan Standarisasi BiayaPersewaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
	PNS Golongan IV	65,000	
	PNS Golongan III	60,000	
	PNS Golongan II dan I	55,000	
	<b>Perjalanan dinas ke Kota Salatiga (PP) : Lebih dari 8 (delapan) Jam :</b>		
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	110,000	
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	100,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	90,000	
	PNS Golongan IV	75,000	
	PNS Golongan III	70,000	
	PNS Golongan II dan I	65,000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>		
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	70,000	11. Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dibuktikan dengan :

	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	65,000	a. Surat Perintah Tugas ;
	Pejabat Eselon IV dan V	60,000	b. Surat Perintah Perjalanan
	PNS Golongan IV	55,000	Dinas yang didalamnya ada
	PNS Golongan III	50,000	bukti kedatangan oleh
	PNS Golongan II dan I	45,000	pejabat yang menerima
			kedatangan/ yang dikunjungi
<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIAYAI OLEH PANITIA PENYELENGGARA</b>			
			c. Tiket Pergi – Pulang, retribusi terminal, nota BBM jika
<b>1</b>	<b>LUAR JAWA</b>		menggunakan kendaraan
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD	660,000	dinas/pribadi ;
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	550,000	
	Tingkat C :		d. Kwitansi sewa jika menggunakan kendaraan sewa;
	Pejabat Eselon III	440,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	385,000	e. Bill/ kwitansi Hotel/ penginapan.
	PNS Golongan IV	330,000	12. f. Tanda terima uang harian;
	PNS Golongan III	315,000	g. Laporan Perjalanan Dinas;
	PNS Golongan II dan I	300,000	
			Untuk pelaksanaan Diklat/ Kegiatan lain yang diharuskan menyeter kepada panitia penyelenggara (kontribusi), tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.
<b>2</b>	<b>DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur</b>		
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD	550,000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	440,000	
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	385,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	330,000	
	PNS Golongan IV	300,000	13. PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pimpinan, diprioritaskan untuk dapat menggunakan transportasi dan penginapan sesuai dengan pejabat yang didampingi.
	PNS Golongan III	290,000	
	PNS Golongan II dan I	280,000	
<b>3</b>	<b>Rata-Rata Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (menginap) :</b>		
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD	350,000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	335,000	14. Pimpinan lembaga/ Organisasi sosial/kemasyarakatan diberikan transportasi yang besarnya setinggi-tingginya sama dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan III
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	295,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	255,000	15. Representasi diberikan khusus untuk perjalanan dinas luar daerah
	PNS Golongan IV	210,000	
	PNS Golongan III	200,000	
	PNS Golongan II dan I	190,000	

<b>UANG REPRESENTASI</b>			
	Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD	500,000	
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	400,000	16.
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	300,000	Anggota / Staf Lembaga/ Organisasi Sosial /Kemasyarakatan / CPNS / PTT diberikan uang harian yang besarannya disesuaikan dengan strata pendidikan :
<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Perjalanan dinas yang melak sanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu menginap) berlaku untuk peserta rapat :		a. Sarjana disetarakan Golongan III b. D3 / SLTA disetarakan Golongan II
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	270,000	
	Tingkat C :		
	Pejabat Eselon III	250,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	225,000	
	PNS Golongan IV	205,000	
	PNS Golongan III	195,000	
	PNS Golongan II dan I	185,000	
2	Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu menginap) berlaku untuk pengemudi :		
		85,000	
3	Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan /sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", berlaku untuk peserta rapat :		17. Penggunaan perjalanan dinas untuk luar negeri Mengacu pada :
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	205,000	a. Instruksi Presiden No.11/2005 Tentang perjalananDinas Keluar Negeri
	Tingkat C :		b. Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 / 2011
	Pejabat Eselon III	195,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	180,000	
	PNS Golongan IV	170,000	
	PNS Golongan III	160,000	
	PNS Golongan II dan I	155,000	18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan sekurang-kurangnya 5 (lima)kilometer dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam Daerah Kabupaten
4	Perjalanan dinas yang mendampingi rapat pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan /sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", berlaku untuk pengemudi :		
		90,000	
5	Uang saku mendampingi rapat dalam rangka pembahasan / sidang/ rapat Komisi DPRD membahas Perencanaan, Penyusunan serta Pertanggungjawaban APBD untuk pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam		
		100,000	19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah berlaku untuk PNS dan Non PNS dalam melak-sanakan tugas kedinasan ke Kecamatan,Kelurahan dan Desa , dan sebaliknya
6	<b>Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)</b>		
	Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD	100,000	
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	90,000	



	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	80,000	
7	Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) Lebih dari 8 (delapan) Jam	100,000	20. Perhitungan perjalanan dinas 8 jam dimulai dari pelaksanaan kegiatan di tempat tujuan sampai dengan selesai
8	Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) Kurang dari 8 (delapan) Jam :		21 Biaya transport dalam daerah diberikan jika menggunakan kendaraan umum sesuai biaya riil
	Pejabat Eselon III	70,000	
	Pejabat Eselon IV dan V	60,000	
	PNS Golongan IV	55,000	
	PNS Golongan III	50,000	
	PNS Golongan II dan I	45,000	22 Biaya transport dalam daerah disediakan dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran
9	Biaya transport dalam daerah	50,000	
10	Transport Kader Kesehatan	20,000	
11	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan kesehatan luar gedung kurang dari 5 km	25,000	

2. Ketentuan Lampiran angka romawi II huruf B, Honor Pengelola Kegiatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
<b>B.</b>	<b>HONOR PENGELOLA KEGIATAN</b>			
	<b>Penyimpan dan Pengurus Barang</b>			
	Nilai Buku > 10 miliar	Bulan	250,000	1) Beban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Nilai Buku 2 s/d 10 miliar	Bulan	200,000	.
	Nilai Buku < 2 miliar	Bulan	150,000	2) Honor diberikan tiap bulan .
	<b>Honor Panitia Penjualan BMD</b>			
	Ketua	org/Paket	150,000	
	Sekretaris	org/Paket	100,000	
	Anggota	org/Paket	75,000	
	<b>Honor Panitia Penaksiran BMD</b>			
	Ketua	org/Paket	75,000	
	Sekretaris	org/Paket	60,000	
	Anggota	org/Paket	50,000	

	<b>Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Panitia/Tim Non Pengadaan Barang / Jasa</b>			
	Penanggungjawab .	Kegiatan	70,000	1) Jumlah sesuai dengan kebutuhan
	Ketua .	Kegiatan	70,000	
	Wakil Ketua .	Kegiatan	70,000	2) Beban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
	Sekretaris .	Kegiatan	60,000	
	Anggota .	Kegiatan	50,000	
	Staf Teknis .	Kegiatan	40,000	3) Honor diberikan maksimal 5 (lima) kali sidang/rapat setiap
	Staf Administrasi .	Kegiatan	40,000	bulan
	Petugas lain (pengemudi, pesuruh, tenaga kebersihan) .	Kegiatan	35,000	
	<b>Tim Pelaksana Penyusun, Pengkaji dan Penganalisa Kebijakan Daerah :</b>			
	Penanggungjawab .	org/hari	125,000	Disesuaikan dengan hari pelaksanaan
	Ketua .	org/hari	110,000	
	Sekretaris .	org/hari	100,000	
	Staf Pelaksana Asistensi ;	org/hari	90,000	
	Staf Pengolah Data.	org/hari	80,000	
	Penyedia data	org/keg/hr	50,000	
	Entry data	lbr	500	
	<b>Pengelola Teknologi Informasi dan Komputer</b>			
	Pengarah	org/keg	1,000,000	Penerapan e- Government
	Ketua .	org/keg	750,000	
	Sekretaris .	org/keg	500,000	
	Anggota	org/keg	400,000	
	Staf Administrasi	org/keg	300,000	
	<b>Kegiatan Penelitian</b>			
	Koordinator Peneliti .	org/bulan	250,000	
	Sekretariat Penelitian .	org/bulan	225,000	
	Peneliti Utama (paling lama 4 jam/hari) .	org/jam	25,000	
	Peneliti (paling lama 4 jam/hari) .	org/jam	20,000	
	Pengolah Data .	org/pnlitian	750,000	
	Pembantu Peneliti .	org/jam	12,500	
	Petugas Survey .	org/rspnden	2,500	
	Pembantu Lapangan .	org/hari	35,000	

<b>Kegiatan Penelitian Dokumen dan pembahasan dengan DPRD terkait Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APED oleh TAPD dan Pembantu TAPD :</b>			
Ketua	org/hari	250,000	
Wakil Ketua	org/hari	225,000	
Sekretaris	org/hari	225,000	
Anggota TAPD, Tim Pengarah	org/hari	200,000	
Pembantu TAPD	org/hari	185,000	
Koordinator peneliti	org/hari	200,000	
Anggota Tim Peneliti	org/hari	175,000	
Staf teknis	org/hari	165,000	
<b>Honor narasumber, penceramah, pengkaji, pembahas dan moderator dalam rangka seminar atau rapat koordinasi atau sosialisasi atau lokakarya :</b>			
Pejabat setingkat Eselon II .	org/keg	800,000	Honor narasumber tidak dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari SATKER ybs. untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh Peserta SATKER ybs
Pejabat setingkat Eselon III .	org/keg	600,000	
Pejabat setingkat Eselon IV / Staf .	org/keg	500,000	
Pakar atau praktisi atau pembicara khusus .	org/keg	2.000,000	
Moderator .	org/keg	400,000	
Instruktur TIK	org/session	750,000	Angka 1 s/d 3 untuk Nara sumber tingkat Kabupaten
Asisten Instruktur TIK	org/session	500,000	
Staf IT Pelatihan TIK	org/session	500,000	
Pejabat Pusat	org/keg	2.000,000	Angka 9 s/d 10 untuk Nara sumber tingkat Provinsi dan Pusat
Pejabat Provinsi	org/keg	1.500,000	
<b>Honor Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pendidikan:</b>			
SLTA .	org/bulan	1,000,000	Honor diberikan setiap bulan sesuai jangka waktu kegiatan
Sarjana Muda atau Diploma ( D3)	org/bulan	1,200,000	
Sarjana (S1) .	org/bulan	1,400,000	
Master (S2) .	org/bulan	1,600,000	
<b>Pengemudi dan Pramubakti</b>			
Pengemudi .	org/bulan	275,000	
Pramubakti .	org/bulan	225,000	

<b>Pekerjaan Lembur</b>			
Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) :			1. Uang makan lembur bagi semua
Golongan IV ;	org/jam	7,000	Golongan diberikan setelah bekerja
Golongan III ;	org/jam	6,000	lembur minimal dua jam
Golongan II ;	org/jam	4,500	secara berturut - turut .
Golongan I ;	org/jam	4,000	2. Waktu kerja lembur pada hari kerja
Pegawai Tidak Tetap disesuaikan tingkat Pendidikan :			paling banyak 3 (tiga) jam
1) Sarjana disetarakan Golongan III ;			perhari atau 14 (empat belas)
2) SLTA/D3 disetarakan Golongan II ;			jam dalam seminggu, dengan
3) SD/SLTP disetarakan Golongan I .			ketentuan :
			- Senin s/d Jum'at untuk 5 hari
Uang Makan Lembur .	orang/keg	12,500	kerja
			- Senin s/d Sabtu untuk 6 hari kerja
Pekerjaan Khusus			3. Waktu kerja lembur pada hari
Pengajar , Menyusun Makalah dan Menguji :			libur paling banyak 8 (delapan)
Pengajar teori / praktek ;	1 jam - 45'	100,000	jam sehari.
Team Teaching (Tim Pengajar) ;	1 jam - 45'	50,000	4. Pada hari minggu dan hari libur
Penguji lesan / tertulis ;	1 jam - 60'	25,000	Nasional biaya uang Lembur
Penyusun naskah / makalah ;	1 mata pljn	100,000	dihitung 200 % dari biaya
Menyusun Naskah Ujian ;	1 mata pljn	50,000	lembur hari kerja .
Menyusun bahan ajar khusus (bahasa asing) ;	kegiatan	150,000	
Pendamping tugas baca .	org/keg	50,000	
Instruktur Senam .	org/keg	200,000	
Pengawas Ujian .	1 jam - 45'	25,000	

Menyusun sistem / program Komputer .	1 jam - 60'	25,000	
Scanning data pendidikan	Lbr	150	
Scanning pengolahan dan analisis LJK	Lbr	600	
<b>Penterjemahan :</b>			
Bahasa Indonesia - Bahasa Asing ;	lembar	12,000	
Bahasa Asing - Bahasa Indonesia .	lembar	12,000	
Profesional penceramah/pengkaji/pembicara khusus/peneliti/praktisi	fee kegiatan	UP	Menyesuaikan dengan tingkat kepakarannya

Penyiar LPPL Radio Suara Serasi	perjam	15,000	
<b>Pengisi Acara Siaran LPPL Radio Suara Serasi :</b>			
Group (lebih dari 4 orang)	kegiatan	400,000	
Perorangan	orang/keg	50,000	
Perorangan dengan keahlian (Bahasa Jawa)	orang/keg	100,000	
Perwakilan TK / Sekolah	kegiatan	100,000	
Korps Musik	kegiatan	2,500,000	
Ensamble Musik	kegiatan	1,000,000	
Instruktur Pelatih Musik	org/keg	250,000	
<b>Tim Pengawalan (Voreyder)</b>			
Dalam daerah	kegiatan	500,000	
Luar daerah	kegiatan	3,000,000	
Tim Petugas Keamanan Kegiatan	kegiatan	500,000	
Pembaca Doa	org/keg	100,000	
Petugas Upacara	org/keg	150,000	
Pendamping petugas upacara	org/keg	100,000	
Instruktur Tata Upacara Bendera	org/keg	100,000	
Profesional Fee Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD)			
Analisis KPPD	org/keg	2,500,000	
Pendamping Analisis KPPD			
- Eselon II a	org/keg	1,000,000	
- Dibawah Eselon II a	org/keg	250,000	
Pengamanan Penanganan Gangguan keamanan	org/hari	75,000	

<b>Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Yustisi</b>			
Atasan Penyidik	org/hari	300,000	
Hakim	org/hari	275,000	
Jaksa	org/hari	250,000	
Panitera	org/hari	125,000	
Penyidik	org/hari	125,000	
Pembantu Penyidik	org/hari	100,000	
Anggota Tidak tetap	org/hari	100,000	
Uang Saku Transmigran	per kk	1,500,000	bantuan uang saku diberikan kepada Kepala keluargayang mengikuti Transmigrasi

<b>Kegiatan kesenian dan kebudayaan</b>			
Dalang	orang	UP	
Pranatacara/sutradara	orang	500,000	
Perias	orang	100,000	Honor dalang menyesuaikan harga pasar dan profesionalisme
Penabuh Gamelan/pelaku seni/pemain	orang	250,000	
Sinden	orang	500,000	
Penerima tamu, pager ayu dan sejenisnya	orang	100,000	
Jamas Cagar budaya	kegiatan	5,000,000	
Pentas kesenian	paket	2,000,000	
Penceramah khusus untuk kegiatan keagamaan	org/keg	1,000,000	
Pemimpin do'a (ulama)	org/keg	800,000	
Qori (pembaca Ayat Suci Alqur"an)	org/keg	300,000	
Kontribusi untuk makam(yayasan)	Kegiatan	3,000,000	
Bisaroh (uang saku ulama yang mengikuti kegiatan keagamaan)	org/keg	200,000	
<b>Professional Fee</b>			
Teknik TIK dan Jaringan Komputer (kerusakan ringan s/d sedang)	org/hari	75,000	
Teknik TIK dan Jaringan Komputer (kerusakan berat)	org/hari	150,000	
Juri lomba	org/keg	250,000	
<b>Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural</b>			
Rohaniwan	org/keg	250,000	
Saksi	org/keg	300,000	

Pemimpin Do'a	org/keg	250,000	
<b>seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi</b>			
Professional Fee Penyeleksi	org/keg	1,000,000	
Sekretariat Panitia	org/keg	100,000	
Kontribusi Magang pengelolaan hasil ternak	org/Paket	4,250,000	
<b>Kegiatan lain- lain</b>			
Biaya Penyampaian SPPT PBB-P2	Lembar	750	
Perekaman data dan pencetakan DHR	Obyek Pajak (OP)	500	
Validasi	Obyek Pajak (OP)	100	

	Perbaiki Peta Desa/Kelurahan	Lembar	40,000	
	Perbaiki Peta Blok dan Penggandaan	Lembar	60,000	
	Penyuluhan	Desa/Kelurahan	500,000	
	Evaluasi dan Penyuluhan Laporan	Kegiatan	500,000	
	Pendataan Lapangan PBB	Obyek Pajak (OP)	6,000	
	Pembantu/Pendamping Pendataan Lapangan PBB	Obyek Pajak (OP)	3,000	
	Pengawas Pendataan Lapangan PBB	Desa/Kelurahan	500,000	
	Saksi pemberkasan dan saksi penunjukan batas tanah	org/bidang	50,000	
	pemasangan patok	org/bidang	50,000	
	petugas ukur	org/bidang	30,000	
	Tenaga Inseminator	org/ekor	50,000	
	Petugas PKB	org/ekor	50,000	
	Petugas ATR	org/ekor	50,000	
	Penjaga Pameran	org/hari	100,000	
	Tenaga dekorasi pameran/bazaar	org/keg	100,000	
	Recorder(Petugas pencatatan kegiatan PO nisasi)	bulan	450,000	
	Honor Recorder ternak pemerintah	bulan	100,000	
	Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dan sejenisnya	org/bulan	400,000	
	Honor PPKBD	org/bulan	125,000	
	Honor pengelola TBM(Taman bacaan Masyarakat)	org/bulan	300,000	
	<b>Tenaga Wiyata Bhakti Pendidikan dan Kesehatan</b>	<b>org/bulan</b>	<b>500.000</b>	
	Pengelola Kejar Paket,PKBM,PAUD dan sejenisnya	org/bulan	200,000	
	Tutor Kejar Paket/Pendidikan non formal	org/bulan	300,000	
	Petugas Raskin	org/bulan	100,000	
	Modin	org/bulan	150,000	
	Pengajar Madrasah Diniyah	org/tahun	300,000	
	RT/RW	tahun	250,000	
	<b>Upah tenaga harian kantor (OUTSOURCHING)</b>	<b>org/bulan</b>	<b>1.610.000</b>	<b>asumsi satu bulan terdiri dari 26 hari kerja</b>
	Upah Pekerja			
	Mandor .	org/hari	80,000	<b>untuk tenaga harian yang bekerja kurang dari 15</b>

Mekanik terlatih .	org/hari	75,000	hari dalam sebulan diberikan upah Rp. 61.500 per hari
Kepala tukang .	org/hari	80,000	
Tukang kayu .	org/hari	75,000	Jam kerja 40 jam per minggu
Tukang batu .	org/hari	75,000	
Tukang besi .	org/hari	75,000	
Tukang cat .	org/hari	75,000	
Tukang plitur .	org/hari	75,000	
Tukang listrik .	org/hari	75,000	
Operator terlatih .	org/hari	75,000	
Operator semi terlatih.	org/hari	65,000	
Pembantu operator.	org/hari	60,000	
Sopir.	org/hari	75,000	
Sopir angkut orang.	org/hari	75,000	
Pekerja.	org/hari	60,000	
Buruh terlatih.	org/hari	70,000	
Buruh semi terlatih.	org/hari	60,000	
Buruh tak terlatih.	org/hari	60,000	
Penganyam bronjong	org/hari	75,000	
Penjaga malam.	org/hari	60,000	
Tukang masak aspal/juru godog.	org/hari	60,000	
Tukang leideng.	org/hari	75,000	
Masinis.	org/hari	75,000	
Pembantu masinis.	org/hari	60,000	
Juru gambar bangunan m <sup>2</sup> bangunan.	org/hari	60,000	
Administrasi	org/hari	70,000	
Ass Driller	org/hari	75,000	
Crew driller	org/hari	70,000	
Crew local	org/hari	60,000	
Crew pengeboran	org/hari	70,000	
Driller	org/hari	85,000	
Geologis	org/hari	90,000	
Koordinator	org/hari	95,000	
Operator Fogging DBD	org/hari	100,000	
Upah tenaga pendamping ODHA	org/hari	100,000	



<b>Pegawai Tewas</b>			
Pemulangan Pegawai Tewas	Orang	500,000	
Pemulangan Pegawai Tewas Dalam Tugas	orang	1,000,000	
<b>Penghargaan Atas Prestasi</b>			
Prestasi Tingkat Nasional :			
Juara I	org /kelompok	10,000,000	
Juara II	org/klpk	7,500,000	
Juara III	org/klpk	5,000,000	
Prestasi Tingkat Propinsi :			
Juara I	org/klpk	5,000,000	
Juara II	org/klpk	4,000,000	
Juara III	org/klpk	3,000,000	
Prestasi Tingkat Kabupaten :			
Juara I	org/klpk	3,000,000	
Juara II	org/klpk	2,000,000	
Juara III	org/klpk	1,000,000	
<b>Biaya Transportasi penderita TB MDR ke RS Rujukan</b>	<b>org/keg</b>	<b>400.000</b>	
Biaya trasportasi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	org/keg	200,000	
Biaya Transportasi Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	org/keg	250,000	
Biaya Transportasi Paska tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan sejenisnya	org/keg	500,000	
Biaya Transportasi Peserta KB yang mengalami kegagalan/Komplikasi dan sejenisnya	org/keg	200,000	
<b>uang Saku/transport siswa/masyarakat</b>			
Tingkat Kecamatan	org/keg	25,000	
Tingkat Kabupaten	org/keg	50,000	
Tingkat Karesidenan/Propinsi	org/keg	100,000	
Tingkat Nasional	org/keg	250,000	
<b>uang Saku/transport kelompok kesenian</b>			
Alat membawa sendiri	org/keg	100,000	
Alat disediakan panitia	org/keg	75,000	
<b>Honorarium Panitia Pilkades (kabupaten,Desa,KPPS)</b>			
Ketua	org/bulan	250,000	
Wakil Ketua	org/bulan	200,000	

	Sekretaris	org/bulan	175,000	
	Bendahara	org/bulan	175,000	
	Anggota	org/bulan	150,000	
	<b>Honorarium Panwas Pilkades</b>			
	Ketua	org/bulan	200,000	
	Sekretaris	org/bulan	175,000	
	Anggota	org/bulan	150,000	

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 06-06-2016

MUNDJIRIN

ttd.

BUPATI SEMARANG,

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 08-06-2016

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 27